

## ABSTRAKSI

Bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Penelitian “Proses Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah di Koperasi Istana Artha Weleri” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui prosedur pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah hak milik oleh Koperasi Istana Artha Weleri. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Istana Artha Weleri dalam pembebanan hak tanggungan terhadap tanah hak milik.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data di peroleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan atau wawancara dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah hak milik oleh Koperasi Istana Artha Weleri, mempunyai prosedur dimana seorang debitur jika ingin meminjam dengan plafond di atas 50 juta akan dipasang hak tanggungan dengan jaminan berupa tanah, tanah plus bangunan, tanah sawah atau tanah kosong dan di berikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Atas Tanah (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun bilamana debitur sudah dipastikan dapat memenuhi prosedural dan bersih dari tanggungan dari pihak atau lembaga kreditur lainnya, maka debitur hanya akan di beri Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada debitur. 2) Dalam pelaksanaannya, Koperasi Istana Artha Weleri mempunyai beberapa kendala-kendala yang di hadapi, baik dari luar (Faktor Eksternal) atau dari dalam (Faktor Internal) itu sendiri. Di antaranya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang pentingnya akses legalitas hukum atau hukum yang berlaku ketika diberikannya hak tanggungan kepada masyarakat, serta kurangnya monitoring dari pihak koperasi sehingga terjadi cacat hukum di dalam Surat / Sertifikat tersebut.

**Kata Kunci: Hak Tanggungan, Koperasi, Tanah**